



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023 (AUDITED)

KANTOR BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Balembang, 13 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran.



DENNY MICHELS ADLAN, S.T.,M.M
Pembina (IV.a)

NIP. 19790205 2200604 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 13 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran.




DENNY MICHELS ADLAN, S.T.,M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 19790205 2200604 1 002

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* BPTD Kelas II Sumatera Selatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Per-31 Desember 2023 adalah sebesar Rp865.282.585 atau mencapai 712,17% dari target penerimaan sebesar Rp121.500.000

Realisasi Belanja Negara pada Per-31 Desember 2023 adalah sebesar Rp177.616.063.374 atau mencapai 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp177.722.722.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per-31 Desember 2023. Nilai Aset Per-31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 451,420,562,026 terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp130.819.606.666; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 311,860,179,333 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8.740.776.027. Nilai Kewajiban dan Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.447.061.477 dan Rp 448,973,500,549.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Per-31 Desember 2023

adalah sebesar Rp545.711.545; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp183,964,002,758; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp183,964,002,758). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp94.575.096.394) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp277,993,387,607)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp586.659.528.198 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp277,993,387,607) dan ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp77,775,708,131 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp62.531.651.827 sehingga Ekuitas entitas Per- 31 Desember 2023 adalah senilai Rp448.973.500.549.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Per-31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per-31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2023			TA. 2022
		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%REALISASI ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		865.282.585	865.282.585	100	611.635.043
JUMLAH PENDAPATAN		865.282.585	865.282.585	100	611.635.043
BELANJA					
Belanja Pegawai		24.296.849.000	24.296.835.725	100,00	21.717.256.266
Belanja Barang		98.692.708.000	98.631.687.507	99,94	111.690.307.827
Belanja Modal		54.718.744.000	54.687.540.142	99,94	91.912.257.640
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		177.708.301.000	177.616.063.374	99,95	225.319.821.733

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan		130.819.606.666	150.718.894.002
JUMLAH ASET LANCAR		130.819.606.666	150.718.894.002
ASET TETAP			
Tanah		35.860.048.651	35.860.048.651
Peralatan dan Mesin		211.369.835.922	309.097.745.901
Gedung dan Bangunan		90.599.236.469	69.118.048.901
Jalan, Irigasi dan Jaringan		111.390.244.454	68.176.846.265
Aset Tetap Lainnya		13.060.000	13.060.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		297.546.600	108.650.951.712
AKUMULASI PENYUSUTAN		(137.669.792.763)	(160.661.806.984)
JUMLAH ASET TETAP		311.860.179.333	430.254.894.446
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud		6.306.083.300	5.710.696.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		2.509.561.477	-
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA		(74.868.750)	(24.956.250)
JUMLAH ASET LAINNYA		8.740.776.027	5.685.739.750
JUMLAH ASET		451.420.562.026	586.659.528.198
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		2.447.061.477	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.447.061.477	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.447.061.477	-
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		448.973.500.549	586.659.528.198
JUMLAH EKUITAS		448.973.500.549	586.659.528.198
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		451.420.562.026	586.659.528.198

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		545.711.545	597.195.977
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		545.711.545	597.195.977
JUMLAH PENDAPATAN		545.711.545	597.195.977
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		24.296.835.725	21.717.256.266
Beban Persediaan		1.273.437.652	757.725.060
Beban Barang dan Jasa		50.315.854.089	47.288.226.901
Beban Pemeliharaan		6.263.107.871	2.855.700.822
Beban Perjalanan Dinas		5.865.216.264	4.690.951.531
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		65.995.548.410	169.606.265.502
Beban Penyusutan dan Amortisasi		29.954.002.747	35.377.074.321
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		183.964.002.758	282.293.200.403
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(183.418.291.213)	(281.696.004.426)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(33.154.843.000)	(235.368.571)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		33.154.843.000	235.368.571
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(61.420.253.394)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		319.571.040	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		61.739.824.434	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(94.575.096.394)	(235.368.571)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(277.993.387.607)	(281.931.372.997)
POS LUAR BIASA		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(277.993.387.607)	(281.931.372.997)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL		586.659.528.198	573.587.062.185
SURPLUS/DEFISIT-LO		(277.993.387.607)	(281.931.372.997)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		77.775.708.131	65.490.163.320
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		(16.225.497.394)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	338.950.620
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		94.001.205.525	65.151.140.505
LAIN-LAIN		-	72.195
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		62.531.651.827	229.513.675.690
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(137.686.027.649)	13.072.466.013
EKUITAS AKHIR		448.973.500.549	586.659.528.198

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat berkedudukan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Akuntansi Istimewa Palembang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien. akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa,
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan

di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

- kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal hingga DIPA Revisi ke- 12. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	121.500.000	121.500.000
Jumlah	121.500.000	121.500.000
Belanja		
Belanja Pegawai	22.104.607.000	24.311.270.000
Belanja Barang	94.205.272.000	98.692.708.000
Belanja Modal	53.689.454.000	54.718.744.000
Jumlah	169.999.333.000	177.722.722.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp865.282.585*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp865.282.585. Pendapatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan negara bukan pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	121.500.000	865.282.585	712
JUMLAH	121.500.000	865.282.585	712

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan PNBPN mengalami kenaikan sebesar 17,17% dibandingkan dengan realisasi pendapatan PNBPN pada 31 Desember Tahun Anggaran 2022. Kenaikan ini disebabkan karena berkurangnya estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2023. Pendapatan PNBPN pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan berasal dari pendapatan di bidang jasa yaitu pendapatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Jasa andalalin, dan pendapatan jasa perkapalan dan kepelautan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	%NAIK (TURUN)
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	865.282.585	611.635.043	17,17
JUMLAH	865.282.585	611.635.043	17,17

*Realisasi Belanja
Negara
Rp177.616.063.374*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp177.616.063.374 atau 99,94% dari anggaran belanja sebesar Rp177.708.301.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Belanja Pegawai	24.296.849.000	24.296.835.725	100,00
Belanja Barang	98.692.708.000	98.631.687.507	99,94
Belanja Modal	54.718.744.000	54.687.540.142	99,94
JUMLAH	177.708.301.000	177.616.063.374	99,95

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 11,84% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena alokasi anggaran pada Tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Tahun 2022

yaitu masing-masing sebesar Rp177.616.063.374 dan Rp225.319.821.733.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	24.296.835.725	21.717.256.266	5,61
Belanja Barang	98.631.687.507	111.690.307.827	(6,21)
Belanja Modal	54.687.540.142	91.912.257.640	(25,39)
JUMLAH	177.616.063.374	225.319.821.733	(11,84)

Belanja Pegawai

Rp24.296.835.725

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.296.835.725 dan Rp21.717.256.266. Belanja Pegawai pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan yaitu gaji dan tunjangan sudah di kelola secara mandiri oleh BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,61% dari Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan CPNS sebanyak 31 orang pada Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.354.610.157	11.273.351.880	4,58
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	40.884.764	-	100,00
Belanja Lembur	556.088.000	770.471.000	(16,16)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	11.345.260.103	9.673.435.824	7,95
JUMLAH BELANJA BRUTO	24.296.843.024	21.717.258.704	5,61
PENGEMBALIAN BELANJA	7.299	2.438	49,92
JUMLAH BELANJA	24.296.835.725	21.717.256.266	5,61

Belanja Barang

Rp98.691.917.107

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.691.917.107 dan Rp111.690.307.827. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami

penurunan sebesar (6,18%) dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat pengurangan pagu anggaran Belanja Barang pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	28.444.415.515	5.824.775.394	66,01
Belanja Barang Non Operasional	18.792.292.044	36.612.363.911	(32,16)
Belanja Barang Persediaan	473.016.900	313.431.250	20,29
Belanja Jasa	3.070.434.829	4.850.262.596	(22,47)
Belanja Pemeliharaan	7.078.586.726	3.073.558.909	39,45
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.865.216.264	4.690.951.531	11,12
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	34.967.954.829	56.331.099.872	(23,40)
JUMLAH BELANJA	98.691.917.107	111.696.443.463	(6,18)

Belanja Modal

Rp54.687.540.142

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.687.540.142 dan Rp91.912.257.640. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (25,37%) dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 berkurang sebesar Rp42.615.835.096 dari Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.698.551.738	20.875.938.640	12,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.019.995.904	70.635.831.000	(43,20)
Belanja Modal Lainnya	-	400.488.000	
JUMLAH BELANJA	54.718.547.642	91.912.257.640	(25,37)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Tahun Anggaran 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023 dan TA. 2022

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
JUMLAH BELANJA	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp26.698.551.738

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.698.551.738 dan Rp20.875.938.640. Pada Tahun 2023, belanja modal peralatan dan mesin pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 12,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal peralatan mesin Tahun

2023 meningkat sebesar Rp5.822.613.098 dari Tahun Anggaran 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal PM
TA. 2023 dan TA. 2022*

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.698.551.738	20.875.938.640	12,24
JUMLAH BELANJA	26.698.551.738	20.875.938.640	12,24

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp54.718.547.642*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.718.547.642 dan Rp91.912.257.640 Untuk periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023, belanja modal gedung dan bangunan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar (25,37%) dibandingkan dengan Tahun 2022. Karena pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdapat kegiatan pembangunan *Multiyears Contract* berupa Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Tahap II Tahun 2020 – 2023 yaitu sebesar Rp99.319.942.316. Pada Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pembangunan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Api-Api Tahap II sehingga alokasi anggaran pembangunan Tahun 2023 menurun dari tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.718.547.642	91.912.257.640	(25,37)
JUMLAH BELANJA	54.718.547.642	91.912.257.640	(25,37)

*Belanja Modal
Lainnya
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp400.488.000. Pada Tahun 2023 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Lainnya.

*Belanja Modal
Jalan. Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2023 dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
BPG14 BPTD WILAYAH VII	-	-	-
JUMLAH BELANJA	-	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.4 Piutang PNB

*Piutang PNB
Rp0*

Saldo Piutang PNB periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i>	C.9 Belanja Dibayar di Muka Saldo Belanja Dibayar di Muka periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i>	C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Persediaan Rp 130.819.606.666</i>	C.11 Persediaan Nilai Persediaan periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp130.819.606.666 dan Rp150.718.894.002

mengalami penurunan sebesar 7,07% dibandingkan pada Tahun 2022 dikarenakan alokasi anggaran Belanja Barang Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yaitu berupa Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan (Pengadaan Dan Pemasangan Apj Konvensional) (Ruas Jalan Kab. Desa Limau, Sembawa), Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan (Pengadaan Dan Pemasangan APJ Konvensional) (Kab.Musi Banyuasin), Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Di Provinsi Bangka Belitung (Pengadaan Dan Pemasangan APJ Konvensional)

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

JENIS	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Barang Konsumsi	209.766.744	184.592.667	(6,38)
Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	109.168.391.493	97.620.014.400	(5,58)
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.276.934.609	32.071.507.599	20,23
Jalan, Irigasi, Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	20.063.801.156	-	(100,00)

JENIS	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	943.492.000	100,00
JUMLAH	130.819.606.666	150.718.894.002	(7,07)

Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2023

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	NILAI AKHIR 31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	209.766.744	1.256.008.575	1.281.182.652	184.592.667
Tanah Bangunan untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	109.168.391.493	144.214.399.492	155.762.776.585	97.620.014.400
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.276.934.609	34.124.244.763	23.329.671.773	32.071.507.599
Jalan, Irigasi, Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	20.063.801.156	-	20.063.801.156	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	943.492.000	-	943.492.000
JUMLAH	150.718.894.002	180.538.144.830	200.437.432.166	130.819.606.666

Rincian Mutasi Kurang Persediaan Tahun 2023:

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung Kantor 16 Ilir	199.034.255	Reklasifikasi ke Aset Tetap
2	Rambu Suar Darat	744.756.264	Reklasifikasi ke Aset Tetap
3	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Dermaga 16 Ilir Kota Palembang	995.224.500	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
4	Dermaga Kertapati	16.233.586.894	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
5	Dermaga Sungai Lais	10.654.376.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
6	Dermaga Pelabuhan 16 Ilir	16.947.531.027	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
7	Peningkatan Pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang Tahap IV TA. 2022 (termasuk supervisi)	7.278.960.481	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
8	Perlengkapan Rambu Sungai di Ogan Komering Ilir Definitif (dengan Supervisi) TA. 2017	860.330.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
9	Pekerjaan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Penghubung Jalan Nasional Provinsi Babel TA. 2021	441.713.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
10	Pekerjaan Bantuan Teknis Perlengkapan Pemenang WTN TA. 2021	487.116.207	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
11	Pekerjaan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Penghubung Jalan Nasional di Provinsi Sumsel TA. 2021	740.025.653	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
12	Pekerjaan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Pada Pendukung KSPN Tj. Kelayang TA. 2021	3.112.158.248	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
13	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Penghubung Jalan Nasional Prov. Babel TA. 2022 (termasuk supervisi)	500.692.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
14	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Penghubung Jalan Nasional Prov. Sumsel TA. 2022 (termasuk supervisi)	1.123.770.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
15	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung Timur TA. 2022	1.185.345.040	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
16	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung TA. 2022	2.693.957.360	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
17	APJ Konvensional Lengan Tunggal Ruas 037 Sp. Air Dingin - Pagar Alam (Kota Pagar Alam) TA. 2022	880.767.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
18	APJ Konvensional Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Provinsi Bangka Belitung TA. 2023	984.453.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
19	Pemasangan Rambu Suar Sadai - Tg. Ru (LLASDP Babel)	875.542.000	Diserahkan ke Pemerintah Daerah
20	Gedung Mushola Pelabuhan Manggar	194.398.000	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung
21	Pem. Air Bersih Pelabuhan Manggar	285.691.000	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung
22	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Marka Putih di Jalan Penghubung Jalan Nasional Provinsi Babel (Termasuk Supervisi) TA. 2021	937.707.158	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung
23	Marka Jalan di Jl. Pulau Gelasa dan Jl. Term RE.Martadinata-Sumberejo (Termasuk Supervisi) TA. 2021	76.838.359	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
24	Marka Jalan di Jl. Pulau Bangka (Termasuk Supervisi) TA. 2021	159.475.083	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung
25	Marka Jalan di Jl. Semabung-Sampur (Termasuk Supervisi) TA. 2021	198.315.401	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung
26	KDP Dermaga Manggar Tahap I-IV (LLASDP BABEL)	19.188.259.156	Transfer Keluar ke BPTD Kelas III Bangka Belitung

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – PJP
Rp0*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tanah

Rp35.860.048.651

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp35.860.048.651 dan Rp35.860.048.651 .

Peralatan dan Mesin

Rp 221.369.835.922

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp211.369.835.922 dan Rp309.097.745.901. Terdapat penurunan pada saldo aset tetap peralatan dan mesin antara Tahun 2023 dan Tahun 2022 karena berdasarkan PM 6 Tahun 2023 BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dipecah menjadi BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan BPTD Kelas III Bangka Belitung. Sehingga, telah dilakukan transfer aset kepada BPTD Kelas III Bangka Belitung.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Peralatan dan Mesin	313.480.796.864	83.602.476.564	182.961.811.994	214.121.461.434
JUMLAH	313.480.796.864	83.602.476.564	182.961.811.994	214.121.461.434

Gedung dan

Bangunan

Rp90.599.236.469

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp90.599.236.469 dan Rp69.118.048.901. Terdapat aset yang telah didefinisikan berupa Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API Tahap II Multi Years Contract dengan nama barang Bangunan

Dermaga yang setelahnya dilakukan reklasifikasi aset menjadi nama barang dermaga dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang telah didefinisikan menjadi aset tetap.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Gedung dan Bangunan	69.118.048.901	145.329.335.716	123.848.148.148	90.599.236.469
JUMLAH	69.118.048.901	145.329.335.716	123.848.148.148	90.599.236.469

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp111.390.244.454*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp111.390.244.454 dan Rp68.176.846.265. Terdapat reklasifikasi masuk barang pencatatan Dermaga II Pelabuhan Tanjung Api-Api dari nama barang Bangunan Dermaga menjadi Dermaga.

Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023

JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL
		TAMBAH	KURANG	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	68.176.846.265	99.325.542.316	56.112.144.127	111.390.244.454
JUMLAH	68.176.846.265	99.325.542.316	56.112.144.127	111.390.244.454

*Aset Tetap Lainnya
Rp13.060.000*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran

2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.060.000 dan Rp13.060.000.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan*

Rp 297.546.600

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp297.546.600 dan Rp108.650.951.712. Terdapat pendefinitifan aset tetap berupa Dermaga II Pelabuhan Tanjung Api-Api serta Pekerjaan Pengadaan, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Tahun 2023, dan Pembangunan Gedung Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

(Rp137.669.792.763)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing (137,669,792,763) dan (Rp160.661.806.984). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA.2023

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	35.860.048.651	-	35.860.048.651
2	Peralatan Mesin	211.369.835.922	121.865.177.070	89.504.658.852
3	Gedung dan Bangunan	90.599.236.469	12.642.604.034	77.956.632.435
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.390.244.454	3.162.011.659	108.228.232.795

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
5	Aset Tetap Lainnya	13.060.000	-	13.060.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	297.546.600	-	297.546.600
	JUMLAH BELANJA	449.529.972.096	137.669.792.763	311.860.179.333

Aset Tak Berwujud

Rp6.306.083.300

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.306.083.300 dan Rp5.710.696.000.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Rp2.509.561.477

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.509.561.477 dan Rp0. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran dengan mekanisme SPM Penampungan (RPATA).

Rincian Pekerjaan dengan Mekanisme RPATA

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1	Pekerjaan Penyelenggaraan Keperintisan Jalan di Provinsi Bangka Belitung	340.409.582
2	Penyelenggaraan Keperintisan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	158.617.166
3	Subsidi Angkutan Antar Moda KSPN Tanjung Kelayang	165.524.999
4	Pekerjaan Penyelenggaraan Keperintisan Penyeberangan Prioritas Nasional	770.750.730
5	Supervisi Rehabilitasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Periuk	74.259.000
6	Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Periuk	1.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.509.561.477

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp74.868.750)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp74.868.750) dan (Rp24.956.250).

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 2.447.061.477*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp2.447.061.477 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga yang muncul pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan karena adanya penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran yang pembayarannya menggunakan mekanisme RPATA.

Rincian Pekerjaan dengan Mekanisme RPATA

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1	Pekerjaan Penyelenggaraan Keperintisan Jalan di Provinsi Bangka Belitung	340.409.582
2	Penyelenggaraan Keperintisan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	158.617.166
3	Subsidi Angkutan Antar Moda KSPN Tanjung Kelayang	165.524.999
4	Pekerjaan Penyelenggaraan Keperintisan Penyeberangan Prioritas Nasional	770.750.730
5	Supervisi Rehabilitasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Periuk	74.259.000
6	Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Simpang Periuk	1.000.000.000
JUMLAH BELANJA		2.509.561.477

Pada Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Satuan Pelayanan Terminal Simpang Periuk terdapat pemberian kesempatan pekerjaan. Sehingga pekerjaan telah selesai dan BAST pada tanggal 08 Januari 2023.

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp 0*

C.26 Utang yang Belum ditagihkan

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas
Rp 454.579.612.256*

C.28 Ekuitas

Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp454.579.612.256 dan Rp586.659.528.198. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp 545.711.545*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp545.711.545 dan Rp597.195.977.

*Beban Pegawai
Rp24.296.835.725*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.296.835.725 dan Rp21.717.256.266.

*Beban Persediaan
Rp1.273.437.652*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.273.437.652 dan Rp757.725.060. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp50.315.854.089*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.315.854.089 dan Rp47.288.226.901. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan

jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	13.792.571.947	3.966.199.165	55,33
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.830.701.000	478.210.334	58,58
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.210.500	6.745.845	15,45
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	644.208.000	666.400.000	(1,69)
Beban Barang Operasional Lainnya	12.167.724.068	707.220.050	89,01
Beban Bahan	130.195.475	148.620.603	(6,61)
Beban Honor Output Kegiatan	601.019.000	10.608.581.000	(89,28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.056.909.569	24.900.184.278	(15,93)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	954.978.030	(100)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.512.774.829	1.430.153.296	2,81
Beban Sewa	1.540.560.000	1.760.316.000	(6,66)
Beban Jasa Profesi	17.100.000	1.800.000	80,95
Beban Jasa Lainnya	-	1.657.993.300	(100)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.879.701	825.000	87,96
JUMLAH BELANJA	50.315.854.089	47.288.226.901	3,10

Beban Pemeliharaan **D.5 Beban Pemeliharaan**

Rp6.263.107.871

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.263.107.871 dan Rp2.855.700.822. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.832.845.657	1.054.500.000	45,75
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.167.733.990	1.645.995.628	31,61
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	232.515.404	39.984.550	70,65
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	108.500.644	(100)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	7.745.000	6.720.000	7,09
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	22.267.820	-	100,00
JUMLAH BELANJA	6.263.107.871	2.855.700.822	37,37

Beban Perjalanan Dinas
Rp5.865.216.264

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.865.216.264 dan Rp4.690.951.531. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	5.549.786.264	4.558.777.701	9,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293.030.000	132.173.830	37,83
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.400.000	-	100
JUMLAH BELANJA	5.865.216.264	4.690.951.531	11,12

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp 65.995.548.410*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.995.548.410 dan Rp169.606.265.502.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp29.954.002.747*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.954.002.747 dan Rp35.377.074.321. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.436.983.898	33.255.043.758	(11,42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.649.702.872	1.174.888.778	16,81
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.741.346.754	846.128.812	34,60
Beban Penyusutan Irigasi	2.765.924	2.765.924	-
Beban Penyusutan Jaringan	73.290.799	73.290.799	-
Beban Amortisasi Software	49.912.500	24.956.250	33,33
JUMLAH BELANJA	29.954.002.747	35.377.074.321	(8,30)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2023 dan Tahun

Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp61.420.253.394)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022:

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319.571.040	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	61.739.824.434	-	100
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(61.420.253.394)	-	100

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp0 **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp586.659.528.198 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp586.659.528.198 dan Rp573.587.062.185.

Surplus (Defisit) LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

(Rp277.993.387.607) Jumlah Defisit LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp277.993.387.607) dan (Rp281.931.372.997). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Aset
Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Persediaan Rp Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas

(Rp16.225.497.394) nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp16.225.497.394) dan (Rp0).

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp338.950.620.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp94,001,205,525*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023 dan 2021 adalah sebesar Rp94,001,205,525 dan Rp65.151.140.505.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp72.195. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp62.531.651.827*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62.531.651.827 dan Rp229.513.675.690. Transaksi antar Entitas adalah

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	177.616.063.374	225.319.821.733
Diterima dari Entitas Lain	865.282.585	611.635.043
Transfer Keluar	115.205.626.461	-
Transfer Masuk	986.497.499	4.805.489.000
JUMLAH BELANJA	62.531.651.827	229.513.675.690

*Diterima dari Entitas
Lain (DDEL)/Ditagihkan
ke Entitas Lain (DKEL)*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada Tahun 2023, DDEL sebesar Rp865.282.585 sedangkan DKEL sebesar Rp177.616.063.374.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada Tahun 2023, Transfer Masuk sebesar Rp986.497.499 dan Transfer Keluar sebesar Rp115.205.626.461

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp448,973,500,549 Nilai Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp448.973.500.549 dan Rp586.659.528.198.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 03

SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT SUMATERA SELATAN 403847

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	865,282,585	865,282,585	0	138,600,000	611,635,043	473,035,043	441
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	865,282,585	865,282,585	0	138,600,000	611,635,043	473,035,043	441
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	865,282,585	865,282,585	0	138,600,000	611,635,043	473,035,043	441
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	177,708,301,000	177,616,063,374	(92,237,626)	100	225,939,345,000	225,319,821,733	(619,523,267)	100
1. Belanja Pegawai	24,296,849,000	24,296,835,725	(13,275)	100	22,166,681,000	21,717,256,266	(449,424,734)	98
2. Belanja Barang	98,692,708,000	98,631,687,507	(61,020,493)	100	111,860,156,000	111,690,307,827	(169,848,173)	100
3. Belanja Modal	54,718,744,000	54,687,540,142	(31,203,858)	100	91,912,508,000	91,912,257,640	(250,360)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 03
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT SUMATERA SELATAN 403847

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM
Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	177,708,301,000	177,616,063,374	(92,237,626)	100	225,939,345,000	225,319,821,733	(619,523,267)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PALEMBANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENNY MICHELS ADLAN .ST .MM.
197902052006041002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (403847) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	130,819,606,666	150,718,894,002	(19,899,287,336)	(13.20)
JUMLAH ASET LANCAR	130,819,606,666	150,718,894,002	(19,899,287,336)	(13.20)
ASET TETAP				
Tanah	35,860,048,651	35,860,048,651	0	0.00
Peralatan dan Mesin	211,369,835,922	309,097,745,901	(97,727,909,979)	(31.62)
Gedung dan Bangunan	90,599,236,469	69,118,048,901	21,481,187,568	31.08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	111,390,244,454	68,176,846,265	43,213,398,189	63.38
Aset Tetap Lainnya	13,060,000	13,060,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	297,546,600	108,650,951,712	(108,353,405,112)	(99.73)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(137,669,792,763)	(160,661,806,984)	22,992,014,221	(14.31)
JUMLAH ASET TETAP	311,860,179,333	430,254,894,446	(118,394,715,113)	(27.52)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,306,083,300	5,710,696,000	595,387,300	10.43
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	2,509,561,477	0	2,509,561,477	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(74,868,750)	(24,956,250)	(49,912,500)	200.00
JUMLAH ASET LAINNYA	8,740,776,027	5,685,739,750	3,055,036,277	53.73
JUMLAH ASET	451,420,562,026	586,659,528,198	(135,238,966,172)	(23.05)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,447,061,477	0	2,447,061,477	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,447,061,477	0	2,447,061,477	
JUMLAH KEWAJIBAN	2,447,061,477	0	2,447,061,477	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	448,973,500,549	586,659,528,198	(137,686,027,649)	(23.47)
JUMLAH EKUITAS	448,973,500,549	586,659,528,198	(137,686,027,649)	(23.47)
JUMLAH EKUITAS	448,973,500,549	586,659,528,198	(137,686,027,649)	(23.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	451,420,562,026	586,659,528,198	(135,238,966,172)	(23.05)

Keterangan :

FINAL

PALEMBANG, 13 Mei 2024

Penganggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DENNY MICHELS ADLAN .ST .MM.

197902052006041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (403847) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM
 Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	545,711,545	597,195,977	(51,484,432)	(8.621)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	545,711,545	597,195,977	(51,484,432)	(8.621)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	545,711,545	597,195,977	(51,484,432)	(8.621)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	24,296,835,725	21,717,256,266	2,579,579,459	11.878
Beban Persediaan	1,273,437,652	757,725,060	515,712,592	68.061
Beban Barang dan Jasa	50,315,854,089	47,288,226,901	3,027,627,188	6.402
Beban Pemeliharaan	6,263,107,871	2,855,700,822	3,407,407,049	119.319
Beban Perjalanan Dinas	5,865,216,264	4,690,951,531	1,174,264,733	25.033
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	65,995,548,410	169,606,265,502	(103,610,717,092)	(61.089)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

**SATUAN KERJA : (403847) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	29,954,002,747	35,377,074,321	(5,423,071,574)	(15.329)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	183,964,002,758	282,293,200,403	(98,329,197,645)	(34.832)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(183,418,291,213)	(281,696,004,426)	98,277,713,213	(34.888)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(33,154,843,000)	(235,368,571)	(32,919,474,429)	13,986. 351
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	33,154,843,000	235,368,571	32,919,474,429	13,986. 351
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(61,420,253,394)	0	(61,420,253,394)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319,571,040	0	319,571,040	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	61,739,824,434	0	61,739,824,434	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(94,575,096,394)	(235,368,571)	(94,339,727,823)	40,081. 701
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(277,993,387,607)	(281,931,372,997)	3,937,985,390	(1.397)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(277,993,387,607)	(281,931,372,997)	3,937,985,390	(1.397)

Keterangan :
FINAL

PALEMBANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DENNY MICHELS ADLAN .ST .MM.
107902052006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (403847) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:07 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	586,659,528,198	573,587,062,185	13,072,466,013	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(277,993,387,607)	(281,931,372,997)	3,937,985,390	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	77,775,708,131	65,490,163,320	12,285,544,811	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(16,225,497,394)	0	(16,225,497,394)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	338,950,620	(338,950,620)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	94,001,205,525	65,151,140,505	28,850,065,020	-
LAIN-LAIN	0	72,195	(72,195)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	62,531,651,827	229,513,675,690	(166,982,023,863)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(137,686,027,649)	13,072,466,013	(150,758,493,662)	-
EKUITAS AKHIR	448,973,500,549	586,659,528,198	(137,686,027,649)	-

Keterangan :

FINAL

PALEMBANG, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DENNY MICHELS ADLAN .ST .MM.

197902052006041002